
Konstruksi Sosial Kritis dalam Pemberitaan Tirto.id terhadap Reaksi Publik pada Kasus Pelarangan Pengecer Jual LPG 3 Kg

Syaifuddin Muhammad Mirza¹, Hendra Alfani²

¹Produksi Media, Politeknik Negeri Lampung, Lampung, Indonesia

²Ilmu Komunikasi, Universitas Baturaja, Sumatera Selatan, Indonesia

Email: ¹syiaifuddinmuhammadmirza@polinela.ac.id, ²hefanila02@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze the critical social construction developed by the online media Tirto.id in its coverage of the government policy banning retailers from selling 3 Kg LPG cylinders, issued by the Minister of Energy and Mineral Resources in February 2025. The policy sparked broad public reaction due to its sudden implementation, lack of proper dissemination, and failure to consider the geographical and economic access of marginalized communities. In this context, media functions as a reality-construction agent that frames issues through particular perspectives. Using Robert N. Entman's framing analysis model, this study explores how Tirto.id defines the problem, diagnoses the causes, makes moral judgments, and offers remedies regarding the issue. The findings show that Tirto.id consistently aligns with marginalized groups, presenting narratives, citizen testimonials, and expert critiques against the policy. The dominant framing emphasizes government failure to anticipate social impacts and highlights a lack of coordination among state agencies. Therefore, Tirto.id acts not only as an information channel but also as a public opinion shaper, advocating for social justice through its editorial stance. This study underscores the importance of media literacy and the role of critical journalism in holding public policies accountable.

Keywords: Social Construction, Framing, LPG 3 Kg, Public Policy

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi sosial kritis yang dibentuk oleh media online Tirto.id dalam peliputan kebijakan pelarangan pengecer menjual LPG 3 Kg oleh Menteri ESDM pada Februari 2025. Kebijakan ini memicu respon publik yang luas karena dinilai mendadak, minim sosialisasi, dan tidak mempertimbangkan kondisi geografis serta akses ekonomi masyarakat kecil. Dalam konteks ini, media berperan sebagai agen konstruksi realitas yang mampu membingkai isu dengan sudut pandang tertentu. Dengan menggunakan metode analisis *framing* Robert N. Entman, penelitian ini mengkaji bagaimana Tirto.id mendefinisikan masalah, mendiagnosis penyebab, memberikan penilaian moral, dan menawarkan rekomendasi penyelesaian terhadap isu tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tirto.id secara konsisten berpihak pada kelompok masyarakat marjinal dengan menampilkan narasi, kutipan warga, dan opini pakar yang mengkritik kebijakan pemerintah. *Framing* yang dibangun Tirto.id menekankan bahwa negara gagal mengantisipasi dampak sosial kebijakan dan menunjukkan minimnya koordinasi antar lembaga negara. Tirto.id tidak hanya

menyampaikan informasi, tetapi juga membentuk opini publik dan menegaskan posisi ideologis dalam mendukung keadilan sosial. Penelitian ini menegaskan pentingnya literasi media dan peran media dalam mengkritisi kebijakan publik.

Kata kunci: Konstruksi Sosial, *Framing*, LPG 3 kg, Kebijakan Publik

PENDAHULUAN

Mengamati peristiwa kelangkaan *liquefied petroleum gas* atau LPG 3 Kg (Gas Melon) diberbagai daerah di Indonesia yang disebabkan oleh pemberlakuan aturan distribusi harus melalui agen resmi. Terhitung mulai tanggal 1 Febuari 2025, Pemerintah resmi menerbitkan peraturan yang melarang pengecer untuk menjual LPG 3 Kg kepada masyarakat. Kebijakan ini menimbulkan kegaduhan karena tidak mempertimbangkan kondisi geografis dan akses ekonomi masyarakat terutama daerah yang aksesnya terbatas. Akibat dari kebijakan tersebut terjadilah antrean panjang dipangkalan resmi karena kelangkaan LPG 3 Kg dipengecer dan masyarakat terserang *panic buying* yang membuat lonjakan harga tidak bisa dihindari (Ramadhanty, 2025b). Aturan ini dinilai sangat tergesa-gesa karena Bahlil selaku Menteri ESDM tidak melakukan koordinasi maupun mengeluarkan pemberitahuan kepada DPR sebelum menjalankan kebijakan ini. Dibeberapa wilayah, pangkalan resmi memiliki jarak yang lumayan jauh bahkan sampai ada laporan warga yang meninggal dunia setelah mengantre untuk membeli LPG 3 Kg di agen resmi (Azzahra, 2025a).

Kebijakan LPG 3 Kg awalnya disiapkan untuk menggantikan penggunaan minyak tanah dan program ini terbukti memberikan banyak manfaat bagi anggaran negara serta masyarakat ekonomi kebawah (Ramadhan et al., 2019). Meskipun pengguna dan distribusinya diawasi karena ada syarat serta ketentuan khusus, Badan Pusat Statistik mencatat rasio penggunaan gas rumah tangga di Indonesia mencapai angka 86.91 persen per tahun 2023 (Badan Pusat Statistik, 2024). Penggunaan gas yang terus meningkat per tahunnya menegaskan kalau gas sudah menjadi kebutuhan utama dalam kehidupan masyarakat meskipun kuota LPG 3 Kg terbatas namun permintaannya sangat tinggi.

Kebijakan yang melarang pengecer untuk menjual LPG 3 Kg kepada masyarakat ini sangat menyulitkan bagi pedagang ataupun rakyat kecil karena aturan ini bertentangan dengan komitmen pemerintah yang berpihak kepada rakyat kecil. Permasalahan ini memiliki posisi yang cukup spesial ditengah masyarakat bahkan banyak media massa yang menyoroti larangan pengecer untuk menjual LPG 3 Kg kepada masyarakat salah satunya Tirto.id yang cukup gencar memberitakan kejadian ini. Tirto.id sangat fokus dalam memberitakan peristiwa ini dan secara konsisten terus mengupdate perkembangan yang terjadi.

Konsistensi ini membuat masyarakat secara tidak sadar ikut berfokus pada permasalahan dan membuat isu ini menjadi penting untuk diperhatikan. Media memiliki pengaruh besar dalam membangun realitas sehingga keistimewaan dalam prioritas liputan akan berdampak pada penekanan terhadap substansi dipersoalan tertentu (Ayomi, 2021). Jika diamati lebih lanjut, konsistensi Tirto.id dalam memberitakan kebijakan ini kemungkinan memiliki tujuan. Pada dasarnya berita adalah realitas yang telah dikonstruksi sehingga setiap penampilan tanda akan memiliki tujuan dan maksud tertentu. Media membuat makna-makna tertentu tetapi tidak bisa memberikan realitas yang objektif karena semua fakta adalah interpretasi (McQuail, 2011).

Ketika melaporkan suatu kejadian, media memiliki pengaruh besar untuk mempengaruhi publik dalam memahami peristiwa yang terjadi. Wartawan akan mengkonstruksi realitas yang didapatkan kemudian pemberitaan akan dibingkai sesuai dengan kepentingan media itu sendiri. Apalagi dalam kejadian pelarangan pengecer untuk menjual LPG 3 Kg kepada masyarakat yang diberitakan oleh Tirto.id, dengan memanfaatkan konsep konstruksi realitas sosial maka aturan ini bisa saja dinilai secara berbeda dengan apa yang

sesungguhnya sedang terjadi. Penampilan tanda, pemilihan kata, penggunaan kalimat hingga pemilihan narasumber pun akan membingkai kejadian untuk menghasilkan suatu konstruksi yang telah direncanakan.

Pada dasarnya media memiliki pengaruh besar dalam mengelola informasi dan seringkali memberikan pengaruh pada cara pandang publik terhadap suatu peristiwa. Media digunakan untuk membentuk suatu realitas terhadap peristiwa namun media juga memiliki realitasnya sendiri yang tujuannya untuk mempengaruhi publik supaya berfokus pada gambaran realita yang dibentuk oleh media itu sendiri. Hal ini terjadi karena media memiliki peran dalam mempengaruhi publik melalui suatu informasi yang realitasnya diolah menjadi suatu cerita atau wacana yang bermakna (Lusdiana & Yesicha, 2020).

Pada peristiwa lain yang berkaitan dengan kebijakan publik, Tirto.id secara konsisten memosisikan pemberitaannya yang dilihat dari sudut pandang publik. Seperti pada pemberitaan UU Cipta Kerja Omnibus Law, Tirto.id tidak sepenuhnya menunjukkan sikap netral karena pemilihan narasumber dari pihak non pemerintah lebih dominan. Selain itu Tirto.id lebih aspiratif terhadap selera pasar, hal ini tergambarkan dari berita-berita yang diterbitkan mengandung unsur penolakan, ketidaksetujuan dan kontroversi dengan porsi yang cukup banyak di dalam pemberitaan (Novita et al., 2021).

Selain itu pada kegagalan penanganan pandemi Covid-19 oleh Menkes, Tirto.id juga membingkai kejadian tersebut dalam sudut pandang publik. Hal ini tergambarkan dari pemilihan narasumber yang didominasi oleh non pemerintah. Selain itu, penggunaan kata-kata provokatif, keras dan satire memiliki intentsitas yang cukup sering ditonjolkan (Musthofa & Putra, 2021). Tirto.id secara konsisten memosisikan pemberitaannya pada reaksi publik dalam melaporkan kejadian yang berhubungan dengan kebijakan ataupun fenomena yang kontroversial. Meskipun tidak secara vulgar tetapi Tirto.id memanfaatkan pembingkai secara optimal untuk membangun suatu konstruksi tertentu.

Pada dasarnya media memiliki pengaruh yang besar dalam mengelola informasi dan seringkali memberikan pengaruh pada cara pandang publik terhadap suatu peristiwa. Media digunakan untuk membentuk suatu realitas terhadap peristiwa namun media juga memiliki realitasnya sendiri yang tujuannya untuk mempengaruhi publik supaya berfokus pada gambaran realita yang dibentuk oleh media itu sendiri. Hal ini terjadi karena media memiliki peran dalam mempengaruhi publik melalui suatu informasi yang realitasnya diolah menjadi suatu cerita atau wacana yang bermakna (Lusdiana & Yesicha, 2020).

Untuk mengetahui konstruksi yang dibangun maka dibutuhkan suatu analisis dalam membongkar bingkai yang digunakan oleh media saat melaporkan suatu kejadian. Jika melihat beberapa analisis *framing*, analisis *framing* Entman akan sangat membantu dalam mengungkap pemilihan dan penonjolan aspek tertentu apalagi pada pemberitaan tentang aturan pelarangan pengecer jual LPG 3 Kg. Karena media tidak hanya mempengaruhi publik dari konten tetapi juga karakteristik media itu sendiri (Nasrullah, 2018).

Meskipun media massa dituntut bersikap netral namun informasi akan dipengaruhi dari bagaimana paham ideologi yang dianut oleh media itu sendiri. Maka dari itu, penelitian ini mengangkat rumusan masalah untuk menganalisa bagaimana konstruksi dan pembingkai yang dilakukan oleh Tirto.id terhadap reaksi publik pada aturan pelarangan pengecer jual LPG 3 Kg oleh Menteri ESDM. Tujuan dari penelitian untuk mencari tahu bagaimana Tirto.id membingkai reaksi publik terhadap aturan pelarangan pengecer jual LPG 3 Kg oleh Menteri ESDM.

TINJAUAN PUSTAKA

Liqified Petroleum Gas 3 Kg

Liqified Petroleum Gas (LPG) merupakan bahan bakar gas yang dicairkan pada tekanan tertentu, sumber utama LPG berasal dari minyak bumi mentah yang dihasilkan dari lapangan minyak (Subakdo & Nugroho, 2016). LPG atau elpiji merupakan produk

Pertamina yang diperkenalkan dan dipasarkan dalam bentuk tabung namun distribusinya masih terbatas. LPG 3 Kg dibuat untuk menggantikan penggunaan minyak tanah namun proses distribusinya sedikit berbeda. Hal inilah yang menjadi masalah ketika ada aturan yang melarang pengecer untuk menjual LPG 3 Kg karena dalam prosesnya pengecer sangatlah membantu untuk menjangkau masyarakat yang jauh dari tempat distribusi.

Sistem distribusi LPG 3 Kg berbeda karena adanya subsidi dari pemerintah dan tidak seluruh masyarakat berhak menerimanya. LPG 3 Kg sudah menjadi primadona ditengah masyarakat karena harga yang bersahabat dan ukurannya yang kecil sehingga mudah untuk digunakan ataupun disimpan meskipun penggunaannya memiliki ketentuan tertentu karena distribusi LPG 3 Kg diawasi. Walaupun terdapat revisi aturan dalam Penyediaan dan Pendistribusian LPG, LPG 3 Kg tetap menjadi primadona untuk memenuhi kebutuhan utama dalam kehidupan masyarakat.

LPG 3 Kg sudah sering mendapatkan banyak sorotan karena berbagai masalah yang terjadi salah satunya adanya oknum yang menyalahgunakan. Puncaknya pada 1 Februari 2025 diterapkanlah aturan pelarangan pengecer jual LPG 3 Kg, hal ini memunculkan banyak tanda tanya sekaligus suatu keanehan karena kebijakan ini dinilai menyulitkan masyarakat. Kejadian ini mendapat sorotan secara nasional dan terbukti hingga Presiden pun harus ikut campur dalam menangani permasalahan ini. Menyikapi hal ini, media memberikan perhatian khusus sehingga aturan ini menjadi topik yang sensitif untuk dibahas.

Konstruksi Realitas Sosial

Konstruksi realitas sosial merupakan proses sosial yang membentuk realitas tertentu meskipun dipahami secara berbeda berdasarkan sudut pandang masing-masing. Realitas adalah hasil dari ciptaan manusia berdasarkan kekuatan konstruksi sosial sedangkan konstruktivisme merupakan pandangan yang melihat kebenaran adalah suatu realitas sosial sebagai hasil konstruksi sosial dan bersifat relatif (McQuail, 2011). Konstruksi sosial berfokus untuk membangun, memiliki, dan menciptakan dari tidak ada menjadi ada sehingga *social construction* menggabungkan konstruksi, pemeliharaan, perbaikan, serta perubahan untuk mempertahankannya (Karman, 2015).

Konstruksi realitas dimaknai sebagai upaya membangun realitas dari suatu peristiwa yang tidak tersampaikan dengan baik menjadi sistematis sampai membentuk cerita atau wacana yang bermakna (Arifin, 2023). Media berperan besar dalam membentuk pemahaman terhadap realitas, kekuatan media dalam mengkonstruksi dan mendekonstruksi realitas mendapat keistimewaan dalam liputan sehingga penekanan terhadap substansi tertentu (*framing*) mudah untuk dilakukan (Ayomi, 2021).

Melalui media, realitas dikemas dalam bentuk kabar atau berita yang berisi laporan suatu peristiwa lalu dipresentasikan berdasarkan hasil konstruksi yang telah dilakukan. Berita merupakan hasil dari sebuah konstruksi bagaimana realitas bergantung pada bagaimana wartawan memaknai realitas itu sendiri (Gurning, 2022). Fakta dilapangan akan diproses oleh wartawan lalu ditafsirkan sehingga menciptakan sebuah berita yang telah direkonstruksi ulang berdasarkan kesimpulan yang didapatkan.

Pada dasarnya berita adalah realitas yang telah dikonstruksikan, artinya setiap penampilan tanda akan memiliki tujuan dan maksud tertentu. Media berperan sebagai pembentuk realitas yang berpengaruh terhadap publiknya namun media juga memiliki realitasnya sendiri. Dalam prosesnya, konstruksi realita akan dipengaruhi suatu kepentingan sehingga pada aplikasinya media tidak dapat dianggap netral. Media memiliki kepentingan tersendiri dan seringkali informasi akan dikonstruksi berdasarkan kepentingan tersebut. Media massa umumnya mempengaruhi apa yang dipercaya publik sebagai realitas namun konstruksi realitas yang dilakukan oleh media akan dipengaruhi oleh berbagai faktor tertentu yang membuat realitas menjadi tidak murni.

Melihat konsep konstruksi realitas ini, kejadian pelarangan pengecer jual LPG 3 Kg sudah pasti akan melalui proses konstruksi dari pemahaman wartawan serta kepentingan media itu sendiri. Pada penelitian ini, konsep konstruksi realitas sosial dapat membantu dalam melihat posisi media dalam menceritakan suatu kejadian khususnya pada pelarangan pengecer jual LPG 3 Kg oleh Tirto.id. Untuk melakukan konstruksi, media akan menentukan bingkai seperti apa yang pas supaya relitas bisa sejalan dengan konstruksi yang ditampilkan.

Analisis *Framing* Robert N. Entman

Framing atau pembingkai merupakan metode untuk melihat cara media bercerita (*story telling*) atas peristiwa yang akan berpengaruh pada hasil akhir dari konstruksi realitas. *Framing* juga digunakan sebagai analisis untuk mengetahui bagaimana realitas (peristiwa, aktor, kelompok) dibingkai oleh media, pembingkai ini akan melalui proses konstruksi sehingga dimaknai dengan makna tertentu (Eriyanto, 2011). Sedangkan analisis *framing* dipahami sebagai metode analisis untuk mengetahui bagaimana realitas suatu peristiwa dibingkai lalu analisis ini juga digunakan untuk melihat aspek yang ditonjolkan dan ditekankan oleh media.

Framing akan mengarah pada pemberian definisi, evaluasi, penjelasan, dan rekomendasi dalam suatu wacana untuk menjelaskan kerangka berfikir terhadap peristiwa, melalui penekanan kosa kata dalam teks berita ataupun gambar yang lebih menonjol dari bagian lain dan ditempatkan pada tempat yang strategis agar dapat mempengaruhi publiknya (Eriyanto, 2012). Pemahaman realitas tergantung dari cara publik menafsirkan bingkai dan metode analisis *framing* dimanfaatkan untuk mengetahui bingkai seperti apa yang dibangun oleh media.

Terdapat beberapa model analisis *framing* yang dapat dimanfaatkan salah satunya ialah analisis *framing* milik Robert N. Entman. Konsep *framing* Entman lebih menekankan pada pemilihan (*selection*) dan penonjolan (*salience*) untuk menggambarkan bagaimana realitas di bingkai oleh media (Eriyanto, 2012). Proses seleksi dan penonjolan aspek tertentu dari realitas digunakan untuk memfokuskan bagian yang dianggap penting. Informasi akan menonjolkan aspek-aspek tertentu sehingga terdapat pesan yang memiliki perbedaan dalam porsi nya (Eriyanto, 2012). *Framing* merupakan realitas yang dikonstruksi melalui media massa, realitas akan ditonjolkan dalam sebuah bingkai supaya lebih mudah dikenali. Menurut Entman, metode yang tepat untuk mengungkapkan kekuatan persuasif teks adalah analisis *framing* (Pohan et al., 2023).

Entman membagi analisis *framing* dalam empat elemen yaitu *Define Problem*, mendefinisikan masalah dengan menganalisa permasalahan utama sebagai apa dan menemukan sesuatu yang menjadi masalah. Kemudian *Diagnose Causes*, memperkirakan penyebab masalah dengan menganalisa apa penyebab dan siapa yang dianggap sebagai tokoh utama dari permasalahan. Lalu *Make Moral Judgement*, membuat keputusan moral dengan memberikan argumentasi untuk menyelesaikan masalah. Terakhir *Suggest Remedies* atau *Treatment Recommendation*, menekankan penyelesaian dengan memberikan saran dalam penyelesaian masalah (Eriyanto, 2012).

Model *framing* Entman sangat sesuai untuk menganalisis pemberitaan media terhadap peristiwa yang sifatnya sensitif. Pada studi analisis wacana media, teori ini menjadi landasan teoretis utama dalam memahami bagaimana teks media mengarahkan interpretasi pembaca terhadap suatu isu karena mampu memberikan kerangka analisis yang sistematis dan aplikatif (Alandira et al., 2025). Dengan kata lain, *framing* dimanfaatkan untuk menerjemahkan cara pandang wartawan dalam menentukan isu dan memproduksi berita (Eriyanto, 2012). Oleh karena itu, konstruksi dan pembingkai akan saling berhubungan satu sama lain yang membuat keduanya saling mempengaruhi.

Pada pemberitaan pelarangan pengecer jual LPG 3 Kg oleh Tirto.id, pembingkai dapat diidentifikasi dari penggunaan kalimat judul hingga gambar yang ditampilkan. Namun untuk secara spesifik mengidentifikasi aspek yang ditonjolkan dan bingkai seperti apa yang ingin dibentuk dibutuhkan analisis secara mendalam. Entman menawarkan cara untuk menerjemahkan maksud dan tujuan dari suatu pemberitaan sehingga pesan-pesan tersirat yang ingin disampaikan oleh Tirto.id dapat dengan mudah dipahami.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan analisis *framing* model Robert N. Entman. Analisis *framing* model Entman cocok untuk mengungkap *the power of a communication text* berdasarkan pemilihan fakta melalui proses seleksi isu dan menuliskannya. Metode ini dipilih karena objek penelitian merupakan teks berita dari Tirto.id sehingga data yang telah terkumpul akan diinterpretasikan melalui proses analisis untuk memperdalam pemahaman terhadap data, menyajikan data dan membuat pemaknaan pada data (Creswell, 2017). Untuk mencari tahu bagaimana Tirto.id membingkai reaksi publik terhadap aturan pelarangan pengecer jual LPG 3 Kg, Entman menawarkan suatu cara dengan membagi analisis *framing* dalam empat elemen (Eriyanto, 2012). Elemen-elemen tersebut akan membantu peneliti untuk menggambarkan proses seleksi dan penonjolan aspek-aspek tertentu yang dilakukan oleh Tirto.id.

Tabel 1. Analisis Framing Model Entman Pada Salah Satu Berita “Kisruh Gas 3 Kg Langka, Rakyat Makin Terjepit”

<i>Define Problems</i> (Pendefinisian Masalah)	<ul style="list-style-type: none"> ● Pasokan gas LPG 3 kilogram (kg) seret
<i>Diagnose Causes</i> (Memperkirakan Masalah atau Sumber Masalah)	<ul style="list-style-type: none"> ● Masyarakat di beberapa tempat sulit mendapatkan gas bersubsidi. ● Harga melambung tinggi. ● Pembelian gas melon hanya dapat dilakukan di agen-agen resmi Pertamina. ● Anggaran yang terbatas karena banyaknya program populis dalam Kabinet Merah Putih.
<i>Make Moral Judgment</i> (Membuat Keputusan Moral)	<ul style="list-style-type: none"> ● Selama ini subsidi LPG 3 kg banyak dinikmati masyarakat dengan kemampuan ekonomi cukup baik, bahkan beberapa dioplos untuk dijual kepada industri. ● Pemerintah tak bisa mengalokasikan anggaran lebih untuk menambah subsidi gas melon.
<i>Treatment Recommendation</i> (Menekankan Penyelesaian)	<ul style="list-style-type: none"> ● Agar tak terjadi kelangkaan, Tirto.id menyarankan pemerintah mengatur distribusi barang bersubsidi tepat sasaran atau memperbanyak stok barang dengan konsekuensi pembengkakan anggaran.

Sumber: Olahan Peneliti

Penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivis dengan menganggap kebenaran realitas sosial merupakan hasil konstruksi dan bersifat relatif, realitas sosial yang dirasakan setiap seseorang tidak dapat disamakan (Eriyanto, 2012). Pada prinsipnya paradigma ini berusaha memberikan pemahaman tentang makna, norma, peran dan aturan bekerja dalam komunikasi. Sehingga data akan diseleksi kemudian diinterpretasikan pada setiap elemen *framing* Entman lalu data akan dianalisis untuk menarik kesimpulan dan analisis akan dilakukan secara deskriptif kualitatif.



Gambar 1. Tahap Analisis Penelitian
Sumber: (Ikbal & Sukmawati, 2023)

Fokus penelitian ini menganalisis bingkai kelangkaan LPG 3 Kg yang dilihat dari sisi reaksi publik terhadap aturan pelarangan pengecer untuk menjual LPG 3 Kg kepada masyarakat. Sampel penelitian ini diambil dari pemberitaan online yang diterbitkan Tirto.id periode 01-08 Februari 2025, periode yang dipilih ialah awal aturan pelarangan diterapkan sampai update berita terbaru saat pengumpulan data penelitian dilakukan. Berita yang dipilih merupakan informasi yang berkaitan dengan “GAS LPG”, “TABUNG GAS 3 KG”, “LPG 3 KG LANGKA”, “KELANGKAAN ELPIJI” namun dilihat dari sisi reaksi publik sehingga ditemukan 9 berita yang relevan dengan kebutuhan penelitian. Berhubung data yang dikumpulkan berasal dari media online Tirto.id maka peneliti hanya berfokus menganalisis teks beritanya saja. Penelitian ini akan menjelaskan bagaimana Tirto.id mbingkai reaksi publik terhadap aturan pelarangan pengecer menjual LPG 3 Kg kepada masyarakat dan konstruksi realitas seperti apa yang dibangun dalam menyoroti kejadian ini.

Tabel 2. Link Sumber Berita

No	Link Berita
1	https://tirto.id/keluhan-warga-beli-gas-lpg-3-kg-harus-ke-pangkalan-pertamina-g7Wj
2	https://tirto.id/ombudsman-pemerintah-jangan-asal-larang-pengecer-jual-lpg-3-kg-g7WZ#google_vignette
3	https://tirto.id/cerita-warga-kesulitan-beli-gas-lpg-3-kg-tiga-hari-enggak-masak-g7Ys
4	https://tirto.id/warga-meradang-harga-pangan-melambung-tinggi-gas-melon-langka-g7Ws#google_vignette
5	https://tirto.id/karut-marut-kelangkaan-gas-3-kg-hambatan-subsidi-tepat-sasaran-g7YK
6	https://tirto.id/dasco-kritik-pengecer-dilarang-jual-lpg-3-kg-aturannya-mendadak-g7Y7
7	https://tirto.id/dpr-larangan-pengecer-jual-lpg-3-kg-picu-publik-panic-buying-g7Zw
8	https://tirto.id/said-iqbal-turunkan-10-ribu-buruh-bila-lpg-3-kg-masih-langka-g71Z
9	https://tirto.id/kisruh-gas-3-kg-langka-rakyat-makin-terjepit-g75i

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Framing Robert N. Entman

Dalam konteks pelarangan pengecer menjual LPG 3 kg oleh Menteri ESDM pada awal Februari 2025, Tirto.id menjadi salah satu media yang secara aktif memberitakan, mengkritisi, dan mengkonstruksi makna di balik kebijakan tersebut. Pemberitaan Tirto.id

menyajikan serangkaian laporan yang terstruktur dan berkelanjutan mulai awal Februari 2025. Media ini tidak hanya saluran informasi, tetapi juga arena perdebatan ideologi dan representasi kepentingan masyarakat versus negara. Secara umum, *framing* Tirto.id dapat dilihat sebagai cermin dari kegagalan komunikasi kebijakan, lemahnya mitigasi dampak sosial, serta tekanan struktural yang dihadapi oleh kelompok masyarakat rentan dalam menghadapi perubahan distribusi LPG bersubsidi.

Define Problem

Berdasarkan hasil analisis Entman dielemen *define problem*, diketahui jika Tirto.id secara konsisten mendefinisikan inti permasalahan sebagai kebijakan mendadak pemerintah yang menetapkan bahwa mulai 1 Februari 2025, pembelian LPG 3 kg hanya dapat dilakukan melalui pangkalan resmi Pertamina. Dengan menghapus peran pengecer sebagai mata rantai distribusi terakhir, kebijakan ini memutus akses masyarakat terutama mereka yang tinggal jauh dari pusat distribusi formal terhadap barang kebutuhan pokok yang vital. Dalam berita berjudul Keluhan Warga Beli Gas LPG 3 Kg Harus ke Pangkalan Pertamina, Tirto menyoroti keresahan masyarakat yang merasa dipersulit kebijakan ini (Majid, 2025). Pemberitaan tersebut menampilkan narasi dari Ika, seorang warga yang mengeluh harus berjalan jauh untuk membeli gas, serta pedagang seperti Isma dan Wahyu yang kehilangan pasokan dan omzet.

Masalah utama dikonstruksi sebagai terhambatnya akses masyarakat terhadap gas LPG 3 kg akibat kebijakan distribusi satu jalur. Dengan mendefinisikan masalah dari perspektif rakyat kecil, Tirto.id membentuk konstruksi sosial bahwa kebijakan negara tidak kompatibel dengan kondisi objektif masyarakat. Berita Karut-marut Kelangkaan Gas 3 Kg & Hambatan Subsidi Tepat Sasaran menegaskan jika implementasi kebijakan ini telah menciptakan kekacauan sosial berupa antrean panjang, kemacetan, dan bahkan insiden kesehatan (Azzahra, 2025a). Tirto.id membingkai bahwa negara gagal menjamin ketersediaan dan akses terhadap sumber energi rumah tangga bagi masyarakat kelas bawah dan kebijakan ini menciptakan disrupsi dalam kehidupan sehari-hari.

Pemberitaan tidak hanya menyoroti efek kebijakan, tetapi juga memperlihatkan bahwa keputusan tersebut datang secara mendadak dan minim sosialisasi. Dengan demikian, masalah tidak hanya didefinisikan sebagai urusan distribusi logistik, tetapi juga sebagai bentuk keterputusan negara dari realitas sosial rakyat kecil. Tirto membangun narasi yang mengkonstruksi kalau kebijakan ini tidak pro-rakyat yang menimbulkan persepsi kalau pemerintah tidak mempertimbangkan dampak nyata dari kebijakan ini.

Diagnose Causes

Berdasarkan hasil analisis Entman pada elemen *diagnose causes*, Tirto.id mengarahkan pada dua hal utama yaitu buruknya perencanaan pemerintah dan lemahnya pengawasan distribusi. Pada berita Ombudsman: Pemerintah Jangan Asal Larang Pengecer Jual LPG 3 Kg, dijelaskan bahwa pelarangan pengecer bukanlah solusi yang tepat untuk menyelesaikan persoalan distribusi subsidi LPG (Andani, 2025). Pengawasan yang perlu diperkuat bukan penghapusan saluran distribusi informal karena akar masalah bukan terletak pada pengecer itu sendiri, melainkan pada sistem kontrol pemerintah yang lemah. Berita Dasco Kritik Pengecer Dilarang Jual LPG 3 Kg: Aturannya Mendadak juga menegaskan kalau kebijakan ini dijalankan tanpa sosialisasi yang memadai dan tanpa koordinasi antarlembaga (Muhammad, 2025). Tirto.id menekankan kalau Presiden sampai harus turun tangan melihat dampak kebijakan yang menciptakan keresahan sosial. Dengan menyoroti kurangnya koordinasi ini, Tirto membangun narasi bahwa kebijakan ini dibuat secara sepihak dan terburu-buru.

Dalam berita Karut-marut Kelangkaan Gas 3 Kg & Hambatan Subsidi Tepat Sasaran, Tirto.id menjelaskan kalau permainan harga, lemahnya pengawasan, dan buruknya data penerima subsidi membuat sistem distribusi LPG 3 kg menjadi rentan terhadap penyimpangan, termasuk kemungkinan dijual ke sektor industri atau masyarakat mampu (Azzahra, 2025a). Tirto.id menyuarakan jika pemerintah mencoba menutup celah tersebut dengan kebijakan pemutusan peran pengecer, tanpa menyelesaikan akar penyebabnya. Tirto.id membangun konstruksi kalau penyebab dari kegaduhan ini bukan karena niat pemerintah memperbaiki distribusi subsidi, tetapi karena lemahnya persiapan, buruknya sistem komunikasi kebijakan, dan minimnya pelibatan aktor-aktor kunci seperti DPR, pengecer, hingga pemerintah daerah. Tirto.id tidak menolak gagasan reformasi distribusi LPG, tetapi menekankan bingkai kalau akar penyebab masalah justru berasal dari kegagalan manajemen negara dalam melakukan reformasi dengan cara inklusif, transparan, dan berpihak pada kelompok paling rentan.

Make Moral Judgment

Pada hasil analisis Entman dielemen *make moral judgement*, Tirto.id menunjukkan keberpihakan yang cukup jelas terhadap masyarakat kecil, pelaku UMKM, dan pengecer lokal. Tirto.id secara konsisten menampilkan kutipan dari masyarakat yang mengungkapkan kegelisahan, keluhan, hingga ketidakberdayaan mereka dalam mengakses LPG 3 kg. Pada berita Cerita Warga Kesulitan Beli Gas LPG 3 Kg: Tiga Hari Enggak Masak, Khusnul, seorang ibu rumah tangga, mengaku tidak bisa memasak selama beberapa hari karena pangkalan tutup dan warung langganan tidak lagi menjual gas (Ramadhanty, 2025a). Kutipan ini membingkai jika dampak kebijakan bukan hanya material, tetapi juga menyangkut harkat hidup masyarakat.

Berita Said Iqbal Turunkan 10 Ribu Buruh Bila LPG 3 Kg Masih Langka, memperlihatkan reaksi kelas pekerja terhadap kebijakan yang dianggap tidak berpihak pada rakyat (Amin, 2025). Tirto.id menyoroti bahwa pelarangan pengecer mempersempit akses buruh dan keluarga miskin terhadap gas murah, sehingga menimbulkan ancaman sosial yang serius. Dalam berita ini, kebijakan Menteri ESDM dikatakan “ngawur” untuk menunjukkan adanya penolakan terhadap kebijakan negara berdasarkan pertimbangan moral dan keadilan sosial.

Aktor-aktor pemerintah digambarkan tidak responsif, tidak transparan, dan bahkan keliru dalam mengidentifikasi persoalan. Bahlil Lahadalia, menjadi tokoh sentral yang disoroti secara negatif termasuk dikritik oleh DPR, Ombudsman, hingga masyarakat sipil. Pengutipan dari berbagai pihak membantu Tirto.id membentuk narasi moral bahwa kebijakan ini tidak bermoral karena menyulitkan masyarakat kecil dan memperburuk ketimpangan akses energi.

Dalam kasus ini, masyarakat dikonstruksi sebagai korban kebijakan yang tidak manusiawi, tidak rasional, dan tidak adil. Tirto.id membingkai ketidakberdayaan aktor negara dalam menjawab reaksi publik. Bukan pelarangan tetapi perlu penguatan pengawasan sebagai suatu solusi. Analisis ini menunjukkan keberpihakan Tirto.id kepada masyarakat dan mengkonstruksi Menteri ESDM sebagai figur otoriter yang gagal menjembatani kepentingan rakyat dengan regulasi pasar energi.

Treatment Recommendation

Berdasarkan hasil analisis Entman pada elemen *treatment recommendation*, Tirto.id memberikan beberapa rekomendasi seperti pentingnya koordinasi antar kementerian dan lembaga, serta perlunya dialog antara pemerintah dan publik sebelum mengeluarkan kebijakan yang berdampak luas. Pada berita Ombudsman: Pemerintah Jangan Asal Larang Pengecer Jual LPG 3 Kg, disebutkan supaya mengevaluasi ulang kebijakan

tersebut dengan cara mencabut lalu direvisi kembali karena proses kebijakan yang tidak inklusif dan *top-down* hanya melahirkan reaksi balik dari masyarakat (Andani, 2025).

Tirto.id membangun konstruksi kalau pemerintah harusnya memperbaiki sistem pengawasan daripada memotong jalur distribusi yang sudah berjalan. Selain itu, pengecer dinilai tidak perlu dihapus, tetapi dialih fungsi menjadi sub-pangkalan resmi yang terintegrasi dalam sistem distribusi formal. Dalam berita Dasco Kritik Pengecer Dilarang Jual LPG 3 Kg: Aturannya Mendadak, mengajak pengecer daftar lewat aplikasi MAP, yang menunjukkan bahwa teknologi dapat digunakan untuk mendata dan mengontrol distribusi LPG secara lebih adil dan akuntabel (Muhammad, 2025).

Berita Kisruh Gas 3 Kg Langka, Rakyat Makin Terjepit, menyebutkan bahwa bukan ketersediaan barang yang menjadi akar dari kelangkaan melainkan distribusi yang buruk (Gustian, 2025). Tirto membingkai permasalahan ini dengan berfokus pada pentingnya peningkatan infrastruktur energi nasional seperti pembangunan kilang LPG, hilirisasi sumber daya, dan optimalisasi cadangan gas dalam negeri dapat menjadi solusi. Bingkai ini bertujuan untuk membangun konstruksi yang mengkritik sistemik untuk mendorong reformasi struktural, bukan hanya tambal sulam kebijakan.

Frame Dominan dan Konstruksi Realitas Sosial

Berdasarkan hasil analisis dari keempat elemen *framing* Entman, ditemukan kalau pemberitaan Tirto.id menunjukkan kecenderungan pembedaan yang berpihak pada masyarakat kecil. Hal ini terlihat pada pemilihan narasi, tokoh-tokoh yang diangkat, dan kutipan langsung dari warga membuat dominasi bingkai mengarah pada konstruksi untuk mengkritik kebijakan negara. Secara eksplisit, Tirto.id juga membingkai kebijakan larangan pengecer ini sebagai langkah yang tidak mempertimbangkan realitas sosial masyarakat. Kebijakan yang diterapkan justru menimbulkan keresahan publik karena tidak adanya kesiapan infrastruktur distribusi dan sosialisasi yang layak.

Tirto.id lebih banyak menampilkan narasi dari masyarakat yang mengalami kesulitan langsung akibat kebijakan tersebut. Misalnya, dalam berita Cerita Warga Kesulitan Beli Gas LPG 3 Kg: Tiga Hari Enggak Masak, warga yang sebelumnya membeli LPG di warung terdekat kini harus berjalan jauh ke pangkalan resmi (Ramadhanty, 2025a). Narasi semacam ini memperkuat bingkai kalau negara bersikap tidak empatik terhadap kelompok yang paling terdampak oleh kebijakan. Pemerintah tidak siap mengantisipasi efek kebijakan yang mengakibatkan terjadinya *panic buying*, antrean panjang, dan kekacauan pasokan gas melon di lapangan (Muhammad, 2025). Hal ini mempertegas alasan bahwa kebijakan ini tidak hanya lemah secara teknis, tetapi juga gagal secara moral karena tidak mempertimbangkan akses geografis dan ekonomi masyarakat miskin.

Tirto.id menarasikan kalau Pemerintah khususnya Menteri ESDM, dibingkai sebagai aktor yang tidak hanya keliru dalam merumuskan kebijakan, tetapi juga tidak akuntabel karena minim dialog. Dalam berita DPR: Larangan Pengecer Jual LPG 3 Kg Picu *Panic Buying*, terungkap bahwa keputusan besar semacam ini tidak dikonsultasikan terlebih dahulu kepada mitra kerja di DPR (Ramadhanty, 2025b). Tirto.id secara aktif mendesak negara untuk mengakui realitas sosial masyarakat, masih banyak warga yang mengandalkan pengecer sebagai jalur utama memperoleh LPG. Tirto.id juga menekankan bahwa solusi ideal bukanlah penghapusan pengecer, melainkan pembenahan tata kelola distribusi dan pengawasan yang lebih efektif.

Tokoh-tokoh yang dimunculkan oleh Tirto.id dalam pemberitaannya sebagian besar berasal dari pihak masyarakat bawah, organisasi buruh, pengecer, hingga pejabat legislatif yang menyuarakan keresahan publik. Tirto.id mengkonstruksi pemerintah sebagai aktor yang gagal membaca peta sosial masyarakat dan lebih fokus pada pendekatan administratif ketimbang pendekatan berbasis keadilan sosial. Tirto.id

mempertegas konstruksi “rakyat sebagai korban kebijakan negara” yang menjadi bingkai utama pemberitaan Tirto.id. Tirto.id sangat menonjolkan ketimpangan antara logika kebijakan negara dan kebutuhan dasar masyarakat. Aturan pelarangan pengecer menjual LPG 3 kg untuk masyarakat dikonstruksi bukan hanya sebagai komoditas energi, melainkan sebagai sarana kehidupan yang vital bagi kelompok rentan.

Bahkan Tirto.id sampai menyoroti kalau ada korban jiwa saat antrian gas, hal ini adalah contoh nyata bahwa narasi diarahkan untuk memfokuskan bagaimana kebijakan yang tampaknya bersifat administratif justru membawa dampak tragis bagi kelompok marjinal. Tirto.id juga membangun konstruksi realitas sosial bahwa pengecer memiliki peran yang tidak bisa begitu saja dihapus dalam sistem distribusi gas bersubsidi. Pengecer justru dianggap sebagai perpanjangan tangan negara dalam menjangkau masyarakat hingga ke level komunitas terkecil. Tirto.id mengkonstruksi jika penghapusan peran pengecer tanpa mitigasi, sosialisasi, atau transisi yang tepat adalah bentuk kebijakan yang tidak peka sosial. Berita Warga Meradang Harga Pangan Melambung Tinggi & Gas Melon Langka menyebutkan kenaikan harga pangan dan kelangkaan gas menciptakan tekanan ganda pada UMKM dan rumah tangga (Azzahra, 2025b). Tirto.id juga mengonstruksi realitas dalam konteks ekonomi yang rapuh di mana kebijakan negara yang tidak tepat sasaran akan dengan mudah mengguncang kestabilan masyarakat kecil.

Secara spesifik pemberitaan Tirto.id dalam kasus pelarangan pengecer menjual LPG 3 kg ke masyarakat dikonstruksi sebagai kritik terhadap kebijakan negara yang tidak berpihak pada kelompok marjinal dan tidak memadai secara prosedural maupun substantif. Selain itu, Tirto.id menonjolkan konstruksi realitas sosial masyarakat miskin yang kesulitan memenuhi kebutuhan dasar akibat kebijakan negara yang dibuat tanpa keterlibatan publik. Lewat narasi yang kaya, kutipan yang kuat, dan analisis yang mendalam, Tirto.id tidak hanya memberitakan peristiwa, tetapi ikut membentuk pemahaman masyarakat tentang pentingnya keadilan sosial dalam kebijakan publik.

PENUTUP

Pemberitaan Tirto.id tentang pelarangan pengecer jual LPG 3 Kg oleh Menteri ESDM tidaklah netral. Pada kasus ini, Tirto.id berdiri di sisi masyarakat untuk memastikan kebijakan energi benar-benar pro-rakyat. Tirto.id membingkai kebijakan ini sebagai bentuk kegagalan pemerintah dalam memahami dan mengelola realitas sosial masyarakat bawah. Dengan menghadirkan narasi publik, Tirto.id tidak hanya menyuarakan keresahan tetapi juga membangun opini publik yang kritis terhadap kebijakan energi yang tidak adil. Tirto.id menangkap adanya resistensi sosial yang mengorbankan akses publik terhadap kebutuhan dasar. Secara implisit Tirto.id mengkonstruksi kejadian ini dengan memberikan kritik dan mendorong negara kembali pada prinsip keadilan sosial dan perlindungan terhadap kelompok rentan. Pilihan narasi Tirto.id menggambarkan jika konstruksi realitas LPG 3 kg tidak hanya tentang logistik dan harga, tetapi tentang siapa yang memiliki kuasa menentukan apa yang disebut sebagai kebutuhan dasar rakyat.

DAFTAR PUSTAKA

- Alandira, P., Mardiyansyah, Y., Hildansyah, I., & Rohanda Rohanda. (2025). Analisis Framing Pemberitaan Kematian Presiden Iran di Aljazeera. net dan Alarabiya. net. *MUKASI: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 4(2), 212–226. <https://doi.org/10.54259/mukasi.v4i2.4311>
- Amin, I. (2025). *Said Iqbal Turunkan 10 Ribu Buruh Bila LPG 3 Kg Masih Langka*. Tirto.Id. <https://tirto.id/said-iqbal-turunkan-10-ribu-buruh-bila-lpg-3-kg-masih-langka-g71Z>

- Andani, A. U. (2025). *Ombudsman: Pemerintah Jangan Asal Larang Pengecer Jual LPG 3 Kg*. Tirto.Id. https://tirto.id/ombudsman-pemerintah-jangan-asal-larang-pengecer-jual-lpg-3-kg-g7WZ#google_vignette
- Arifin, T. S. N. (2023). Media Massa dan Proses Konstruksi Realitas dalam Kajian Teori Sistem dan Differensiasi. *MUKASI: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 2(2), 132–142. <https://doi.org/10.54259/mukasi.v2i2.1576>
- Ayomi, H. V. (2021). Analisis Framing Media Online Mengenai Pemberitaan Deklarasi Beny Wenda. *Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora*, 03(03), 118–125. <https://jurnalintelektiva.com/index.php/jurnal/article/view/732%0Ahttps://jurnalintelektiva.com/index.php/jurnal/article/download/732/555>
- Azzahra, Q. (2025a). *Karut-marut Kelangkaan Gas 3 Kg & Hambatan Subsidi Tepat Sasaran*. Tirto.Id. <https://tirto.id/karut-marut-kelangkaan-gas-3-kg-hambatan-subsidi-tepat-sasaran-g7YK>
- Azzahra, Q. (2025b). *Warga Meradang Harga Pangan Melambung Tinggi & Gas Melon Langka*. Tirto.Id. https://tirto.id/warga-meradang-harga-pangan-melambung-tinggi-gas-melon-langka-g7Ws#google_vignette
- Badan Pusat Statistik. (2024). *Rasio Penggunaan Gas Rumah Tangga*. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTE1NyMy/rasio-penggunaan-gas-rumah-tangga.html>
- Creswell, J. W. (2017). *Research Design (Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches)*. CA: Sage Publications.
- Eriyanto. (2011). *Anlisis Wacana: Pengantar Analisis Teks Media* (8th ed.). LKIS Printing Cemerlang.
- Eriyanto. (2012). *Anlisis Framing: Komunikasi, Ideologi dan Politik Media*. LKIS.
- Gurning, S. T. (2022). Konstruksi Pemberitaan Backpack Journalist Di Media Sosial. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 12(1), 68–82. <https://doi.org/10.15642/jik.2022.12.1.68-82>
- Gustian, D. (2025). *Kisruh Gas 3 Kg Langka, Rakyat Makin Terjepit*. Tirto.Id. <https://tirto.id/kisruh-gas-3-kg-langka-rakyat-makin-terjepit-g75i>
- Ikbal, & Sukmawati, A. I. (2023). Analisis Framing Robert N. Entman terhadap Kasus Kronologi Penganiayaan Anak di Bawah Umur pada Media Online kompas.com. *Jurnal Ilmiah Multimedia Dan Komunikasi*, 8(2), 69–85. <https://doi.org/10.56873/jimk.v8i2.280>
- Karman. (2015). Sebuah Telaah Teoretis Terhadap Konstruksi Realitas Peter L. Berger. *Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Komunikasi Dan Informatika*, 5(3), 11–23.
- Lusdiana, A. N., & Yesicha, C. (2020). Konstruksi Berita Panti Yayasan Tunas Bangsa Di Riau Pos dan Tribun Pekanbaru. *Jurnal PIKMA : Publikasi Ilmu Komunikasi Media Dan Cinema*, 1(1), 24–38. <https://doi.org/10.24076/pikma.2018v1i1.384>
- Majid, N. (2025). *Keluhan Warga Beli Gas LPG 3 Kg Harus ke Pangkalan Pertamina*. Tirto.Id. <https://tirto.id/keluhan-warga-beli-gas-lpg-3-kg-harus-ke-pangkalan-pertamina-g7Wj>

- McQuail, D. (2011). *TEORI KOMUNIKASI MASSA MCQUAIL: McQuail Mass Communication Theory* (6th ed.). Penerbit Salemba Humanika.
- Muhammad, N. (2025). *Dasco Kritik Pengecer Dilarang Jual LPG 3 Kg: Aturannya Mendadak*. Tirto.Id. <https://tirto.id/dasco-kritik-pengecer-dilarang-jual-lpg-3-kg-aturannya-mendadak-g7Y7>
- Musthofa, H. S., & Putra, D. K. S. (2021). Analisis Framing Pemberitaan Kegagalan Penanganan Pandemi Covid-19 Menteri Kesehatan Terawan Pada Media Republika.co.id dan Tirto.id. *E-Proceeding of Management*, 8(5), 7411–7425. https://scholar.googleusercontent.com/scholar?q=cache:RGYdYZX1h2gJ:scholar.google.com/&hl=id&as_sdt=0,5&scilib=1
- Nasrullah, R. (2018). *Media Sosial: Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Sosioteknologi*. Simbiosis Rekatama Media.
- Novita, I., Nur, I., & Rose, T. (2021). Konstruksi Realitas Media (Analisis Framing Pemberitaan UU Cipta Kerja Omnibus Law dalam Media Online Vivanews dan Tirto.id). *Jurnal Health Sains*, 2(1), 69–84. <https://doi.org/10.46799/jsa.v2i1.162>
- Pohan, S., Sari, R., & Maisyarah. (2023). Pembingkai Bobby Nasution pada SINDOnews.com dalam Mengatasi Banjir dan Kemacetan di Kota Medan. *MUKASI: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 2(2), 111–123. <https://doi.org/10.54259/mukasi.v2i2.1559>
- Ramadhan, T., Liesmana, R., & Putera, R. E. (2019). Pengawasan Pendistribusian Gas LPG 3 Kg Bersubsidi di Kota Padang. *Jurnal Administrasi Publik Dan Pembangunan*, 1(1). <https://doi.org/10.20527/jpp.v1i1.2482>
- Ramadhanty, N. (2025a). *Cerita Warga Kesulitan Beli Gas LPG 3 Kg: Tiga Hari Enggak Masak*. Tirto.Id. <https://tirto.id/cerita-warga-kesulitan-beli-gas-lpg-3-kg-tiga-hari-enggak-masak-g7Ys>
- Ramadhanty, N. (2025b). *DPR: Larangan Pengecer Jual LPG 3 Kg Picu Publik Panic Buying*. Tirto.Id. <https://tirto.id/dpr-larangan-pengecer-jual-lpg-3-kg-picu-publik-panic-buying-g7Zw>
- Subakdo, W. A., & Nugroho, Y. A. (2016). In-bound dan out-bound logistic pada distribusi LPG 3kg di Indonesia. *Jurnal Universitas Muhammadiyah Jakarta, November*, 1–10. https://www.researchgate.net/publication/354688431_IN-BOUND_DAN_OUT-BOUND_LOGISTIC_PADA_DISTRIBUSI_LPG_3KG_DI_INDONESIA%0Ahttps://jurnal.umj.ac.id/index.php/semnastek/article/view/749